

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244, Faksimile : 625341 Laman : <a href="mailto:ntb.kemenkumham.go.id">ntb.kemenkumham.go.id</a>, Email : <a href="mailto:kemenkumham.go.id">kemenkumham.go.id</a>

## **BERITA ACARA**

## PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Kamis, 7 Maret 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Niswati, S.H.

Jabatan

: Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

Instansi

: Pemerintah Kota Bima

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama

: Ignatius M.T. Silalahi, S.H., M.H.

Jabatan

: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Instansi

: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

selanjutnya sebagai Perwakilan Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

- 1. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Bima Nomor 180/1830/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal permohonan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi mengenai Rancangan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 yang dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Perwakilan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Bima/Perwakilan Pemrakarsa;
- 2. Sesuai hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.

SUMAKET PAK I'M

 Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka
Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,

Kota Bima , 7 Maret 2024 a.n. Ketua Tim Kelompok Kerja

Pengharmonisasian,

Ignatius M.T. Silalahi, S.H., M

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

> Parlindurgan NIP 197007011992031002